

REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2019

- Tujuan :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	100%	100%	100%	100%	
		<i>Clearance rate</i> (rasio penyelesaian perkara)	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penurunan tunggakan perkara	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%	80%	80%	80%	
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui <i>small claim court</i>	100%	100%	100%	100%	
		Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	70%	70%	70%	70%	
		Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	100%	100%	100%	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	-	-	-	-	Pengadilan Negeri Sarolangun tidak memiliki zitting plaats
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%	100%	100%	100%	
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	
4.	Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%	100%	100%	100%	
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100%	100%	100%	100%	
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100%	100%	100%	100%	
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikat spesifikasi keahlian	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	
		Pedoman persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter obyektif	100%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Keterangan
			2016	2017	2018	2019	
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%	100%	
		Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penerapan Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung	100%	100%	100%	100%	
		Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%	
		Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	100%	100%	100%	100%	
		Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100%	100%	100%	100%	

Sarolangun, 11 Pebruari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

T. OYONG, S.H., M.H.
NIP. 196403041996031001

JULIADI, S.Kom
NIP. 198508302009041003